

# **LAPORAN KINERJA (LKj)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
 BAB I    PENDAHULUAN .....	
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Landasan Hukum .....	2
C.    Tujuan .....	3
D.    Gambaran Umum Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi .....	3
E.    Peran Strategis Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi .....	10
F.    Keragaman SDM Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi .....	12
G.    Sistematika Laporan .....	15
 BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	18
A.    RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021 .....	18
B.    Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi .....	20
C.    Perencanaan / Perjanjian Kinerja 2019 .....	26
 BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	31
B.    Realisasi Anggaran .....	52
 BAB IV    PENUTUP .....	55
A.    Kesimpulan .....	55
B.    Saran .....	55
 LAMPIRAN	

### Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	100%	98,36 %	96,47 %	
II.	Persentase pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan	-	-	100 %	55,50%	
III	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	-	-	46,66 %	91,43 %	
IV	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan WMK	-	-	-	66,35 %	



Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

Tingkat rata-rata capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sampai dengan Desember 2019 mencapai 77,44%.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan misi ketiga RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu ***Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat***. Untuk itu, seluruh program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi secara konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang telah ditetapkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat 2 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran strategis 1, dan 3 ( 96,47 % dan 91,43 %), sedangkan sasaran 2 dan 4 kurang baik (55,50% dan 66,35 %). Secara keseluruhan, tingkat rata –rata pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah sebesar 77,44 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana tabel dibawah ini :



# Ringkasan Eksekutif

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dapat dilihat dari kondisi ketentraman dan ketertiban umum terhadap situasi daerah yang kondusif.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran.

Penilaian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019-2021 dapat dilihat dari kontribusi ketentraman dan ketertiban umum sebagai penggerak utama dalam menjaga situasi daerah yang kondusif. Kontribusi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas tribumtranmas dan hukum Provinsi Jambi. Walaupun stabilitas tribumtranmas secara nasional cenderung mengalami gejolak akibat dampak pelaksanaan pemilihan langsung yang berpotensi menciptakan instabilitas daerah dan nasional, namun kinerja ketentraman dan ketertiban umum terhadap stabilitas tribumtranmas dan hukum daerah relatif tetap stabil.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah petugas linmas}}{\text{Jumlah RT ( minimal 1 desa 10 org)}}$	Satpol PP Provinsi Jambi	Laporan hasil pendataan Satlinmas
Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bakaran di daerah rawan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran yg ditangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	Satpol PP Provinsi Jambi	Laporan hasil pendataan  Laporan Dinas Instansi terkait Kab/Kota

### C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2019

**Perjanjian Kinerja** merupakan komitmen Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

**Penetapan/Perjanjian kinerja** adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**5 tujuan dalam penyusunan penetapan/perjanjian kinerja**

Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Target	Realisasi	%	Program	Realisasi		
							Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	- Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	96,47 %	96,47 %	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.253.784.200	3.242.545.800	99,65
2.	Meningkatnya stabilitas tibatranmas dan hukum	- Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan	100 %	55,50 %	55,50 %	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.069.493.400	1.027.998.235	96,12
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	- Cakupan petugas perlindungan masyarakat	70 % (10.934) org	64,8 % (10.128) org	91,43 %	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	988.413.000	961.841.061	97,31
4.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap ( Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	66,35 %	66,35 %	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	262.332.500	259.508.070	98,92

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019*



**SATUAN POLISI PAMUNG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	96,47 %	96,47 %	Baik
2.	Meningkatnya stabilitas tbumtranmas dan hukum	- Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan	100 %	55,50 %	55,50 %	Kurang Baik
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	- Cakupan petugas perlindungan masyarakat	70 % (10.934) org	64,8 % (10.128) org	91,43 %	Baik
4.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap ( Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran .	100 %	66,35 %	66,35 %	Kurang baik

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019*

**Tabel 13.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK**  
**di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No.	Tahun	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	-	-	-
2.	2017	100 %	55,81 %	55,81 %
3.	2018	100 %	61,03 %	61,03 %
4.	2019	100 %	66,35 %	66,35 %
5.	2020	-	-	-
6.	2021	-	-	-

Salah satu faktor yang menentukan Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota.

Faktor penyebab meningkat dan atau menurunnya ke 4 Indikator Kinerja

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh masing-masing indikator kinerja, maka dapat dievaluasi bahwa

Peningkatan dan atau menurunnya ke 4 (empat) Indikator Kinerja sebagaimana tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor yakni ; 1) Kondisi sosial masyarakat baik idiologi, politik, ekonomi maupun sosial budaya.2) Perubahan target. 3) Respon dan komitmen pemerintah kabupaten / kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 4) serta cakupan pelayanan kepada masyarakat

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar. Sepanjang tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

#### **A. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat, melalui pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain :

**Sasaran Strategis 2." Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum".**

**Tabel 8.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan	100 %	55,50 %	55,50 %

Peraturan daerah merupakan suatu kewibawaan pemerintah daerah. Oleh karena itu kewibawaan pemerintah daerah akan tercermin pada seberapa taatnya warga masyarakat mematuhi peraturan daerah yang berlaku atau dapat dilaksanakan dengan baik.

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target penegakan perda yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja 2019. Realisasi Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 55,50 % belum sebanding target Tahun 2019 sebesar 100 %.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2016-2021

Perkembangan penegakan perda dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 untuk beberapa Perda Provinsi Jambi menunjukan perkembangan yang belum mengembirakan. Adapun capaian penegakan perda tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



## BAB 2 Perencanaan Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

**A. RPJMD Provinsi Jambi  
2016-2021**

**B. Renstra Satuan Polisi  
Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Provinsi Jambi 2016-  
2021**

**C. Perencanaan/Perjanjian  
Kinerja 2019**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
2. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016-2021
3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2019

### **A. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021**

Visi Pembangunan Provinsi  
Jambi

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021. Adapun Visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 tersebut, yaitu :

**“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN  
SEJAHTERA”**

**J A M B I T U N T A S 2 0 2 1**

6 Misi Pembangunan  
Provinsi Jambi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat

Alokasi anggaran per Bidang/  
Sekretariat.

Anggaran belanja langsung sebagaimana tersebut diatas dialokasikan ke masing-masing Bidang dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat sebesar Rp. 3.209.669.900,-
2. Bidang Trantibum Rp. 3.910.832.950,-
3. Bidang Perundang Undangan Daerah sebesar Rp. 412.444.650,-
4. Bidang Linmas sebesar Rp. 988.413.000,-,-
5. Bidang Pengendalian Kebakaran sebesar Rp. 262.332.500,-

Secara rinci, realisasi serapan dari masing-masing pagu anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 20.  
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2019 Menurut Bidang dan  
Sekretariat

No.	Bidang dan Sekretariat	Realisasi s/d 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1.	Sekretariat	3.209.669.900	3.106.055.316	96,77	103.614.584	3,23
2.	Bidang Trantibum	3.910.832.950	3.865.162.235	98,83	45.670.715	1,16
3.	Bidang PUUD	412.444.650	405.383.100	98,28	7.061.550	1,72
4.	Bidang LINMAS	988.413.000	961.841.061	97,41	26.571.939	2,59
5.	Bidang DAMKAR	262.332.500	259.508.070	98,92	2.824.430	1,08
	<b>Total</b>	<b>8.783.693.000</b>	<b>8.614.893.682</b>	<b>98,08</b>	<b>168.799.318</b>	<b>1,92</b>

Sisa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar 1,92 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar 1,92 %. Penyerapan anggaran ini belum semuanya berbanding lurus dengan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang.

# Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 1	Jumlah Personil Pol PP berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
Grafik 2	Komposisi Pejabat Laki-Laki dan Perempuan .....	14
Grafik 3	Jumlah Personil Satpol PP berdasarkan Pendidikan .....	15
Grafik 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang dan Terpilah Jenis Kelamin .....	13
Grafik 5	Capaian Indikator Penanganan Demo Tanpa Anarkis .....	32
Grafik 6	Realisasi Pelanggaran Perda & Perkada yang diselesaikan .....	34
Grafik 7	Jumlah Anggota Satlinmas di Provinsi Jambi .....	37
Grafik 8	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK .....	39



2. Penanganan pelanggaran peraturan daerah dan keputusan gubernur baik secara non yustisial maupun pro justisia.
3. Pembentukan, fasilitasi dan pengelolaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya optimalisasi penegakan peraturan daerah.
4. Mendorong pembentukan satuan perlindungan masyarakat di kabupaten / kota dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta membantu penanganan bencana dan pengamanan pemilu.
5. Pemetaan daerah rawan kebakaran.

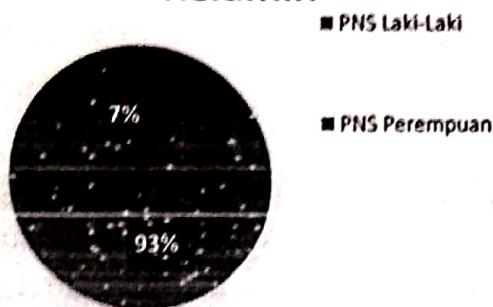
Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan peran strategis

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi antara lain :

1. Gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik daerah maupun nasional.
2. Lambatnya penerimaan aspirasi dari masyarakat pendemo oleh pejabat yang bewenang, sehingga menimbulkan gejolak yang mengarah kepada tindakan anarkhis.
3. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah yang disebabkan oleh tidak lengkapnya peraturan pelaksanaannya baik berupa pergub atau keputusan gubernur.
4. Belum optimalnya kinerja aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Masih kurangnya kecukupan petugas satuan perlindungan masyarakat di daerah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta dalam membantu penanganan bencana dan pengamanan pemilu.
6. Rendahnya minat masyarakat menjadi petugas perlindungan masyarakat di daerah.
7. Belum adanya alokasi dana khusus untuk pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat.

**Grafik I**  
**Jumlah Personil Satpol PP**

**Jumlah Personil Satpol  
PP  
berdasarkan Jenis  
Kelamin**



Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai laki-laki masih relatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 163 orang (93 %) dan perempuan sebanyak 13 orang (7 %) ini menunjukkan perimbangan gender yang belum baik sebagaimana gambar 1 disamping.

**Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan**

Dikarenakan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan /latihan tertentu maka komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi belum berimbang, namun demikian tetap memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan 3 (tiga) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 4. Untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar berikut:

2019 dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait mensosialisasikan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di kabupaten / kota, yakni ; Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.

*Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*



C. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kertertiban dan Keamanan

Program ini bertujuan untuk pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, membantu penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada di daerah.

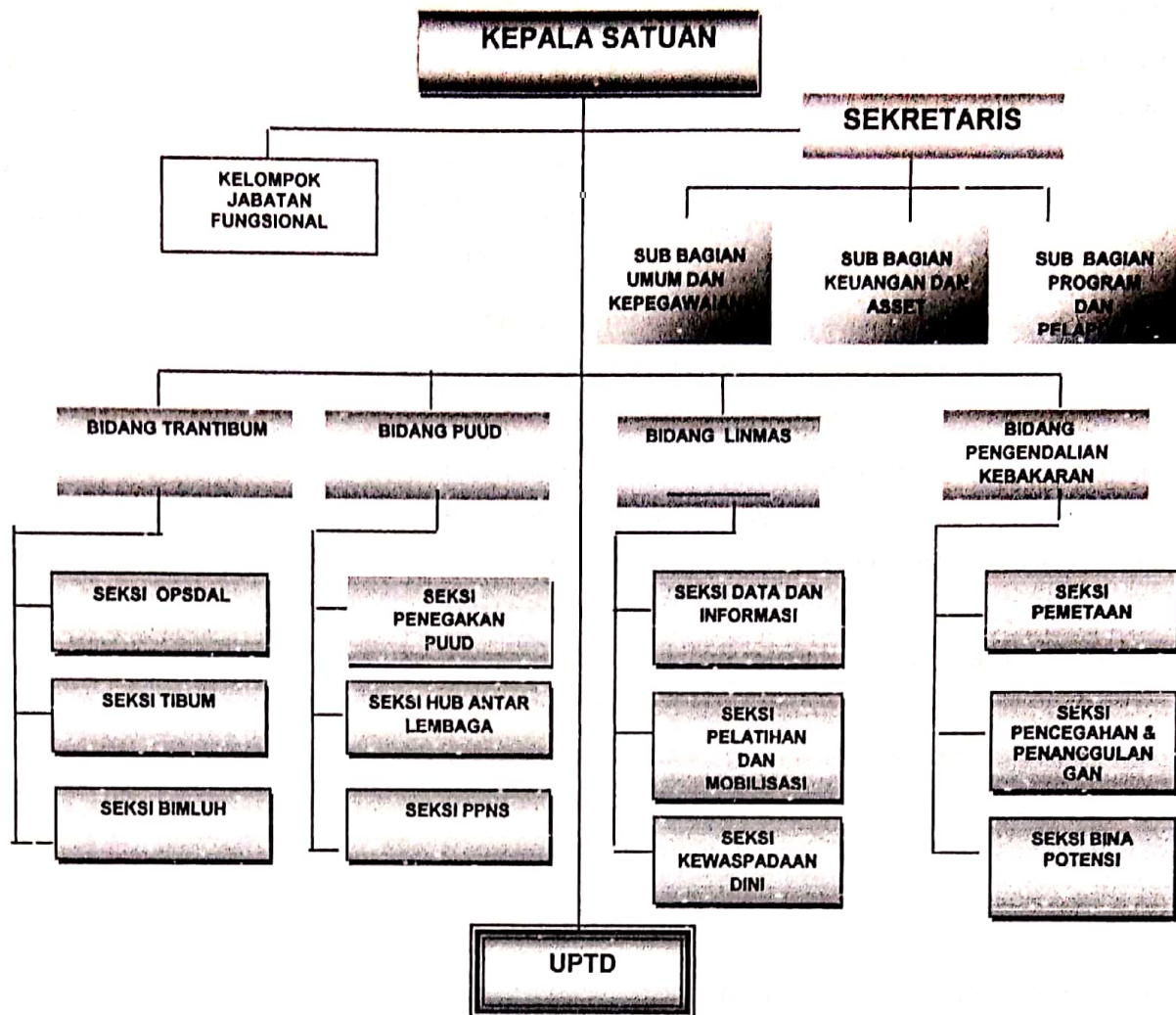
Kegiatan Pembentukan  
Satuan Keamanan  
Lingkungan di masyarakat

1. Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat dimaksudkan mendorong dan fasilitasi kabupaten / kota dalam pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : terlaksananya 4 (empat) kali Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas selama tahun 2019 sebagai mana tabel berikut :



Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi



Tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tugas Kepala Satuan

1. Kepala Satuan .

Tugas Kepala Satuan yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, dan Kelompok jabatan Fungsional.

Tugas Sekretariat

2. Sekretaris dengan tiga Sub Bagian.

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
- Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Sekretariat yaitu menyelenggarakan pelayanan dan

Tahun 2016 Pasal 3	<b><i>Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran “.</i></b>
Fungsi sebagaimana PERGUB Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4	<p>Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai <b><i>fungsi</i></b> sebagaimana Pasal 4 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;</li> <li>2. Penyusunan kebijakan penegakan perda dan perkara .</li> <li>3. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah</li> <li>4. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat</li> <li>5. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran</li> <li>6. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan aparaturnya lainnya</li> <li>7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ol>
Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Berdasarkan PERGUB Jambi Nomor 8 Tahun 2016	<p>Berdasarkan PERGUB Jambi Nomor 8 Tahun 2016, terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang. Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :</p>



8. Masih tingginya angka kejadian kebakaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan badan hukum terhadap bahaya kebakaran.
9. Kondisi daerah Provinsi Jambi yang rawan kebakaran.
10. Masih terbatasnya cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota.

**Langkah Upaya  
peningkatan peran  
strategis**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Peningkatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah serta koordinasi dengan dinas-dinas pengampu perda dalam upaya efektifitas penegakan perda.
3. Mendorong pemerintah kabupaten / kota dalam memenuhi kecukupan petugas perlindungan masyarakat melalui pembentukan petugas linmas di daerahnya masing-masing.
4. Pemberdayaan petugas linmas di daerah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada daerah melalui peningkatan kapasitas linmas.
5. Pemetaan daerah rawan kebakaran.
6. Mendorong peningkatan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota melalui sosialisasi dan penyuluhan.

**F. Keragaman SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi**

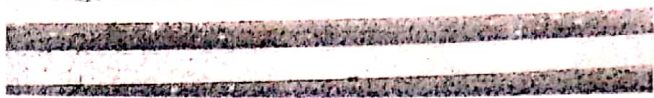
SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi per 31 Desember 2019

Untuk mengemban tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi per Desember Tahun 2019 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 176 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat struktural sebanyak 21 orang
2. Pejabat fungsional sebanyak 74 orang
3. Fungsional umum sebanyak 81 orang



## Aksi Unjuk Rasa dari KSBSI Provinsi Jambi Menolak RUU OMNIBUS LAW



### Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya

#### 5. Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya bertujuan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Jambi. Pada tahun 2019 prioritas pada penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika disamping pengawasan perda-perda yang lainnya.

### Kegiatan Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Produk Hukum Daerah

#### 6. Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Produk Hukum Daerah.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Produk Hukum Daerah pada tahun

dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas kabupaten / kota.

- c. Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan.
- d. Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan.
- e. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

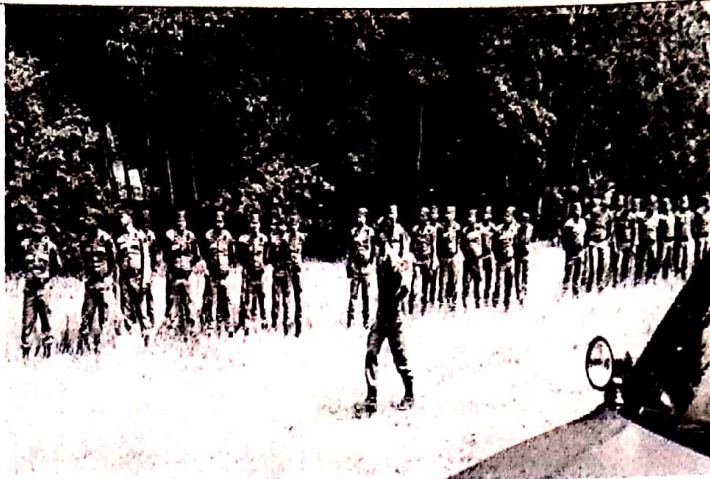
- a. Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Fungsional PPNS.

### E. Peran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Peran strategis yang harus dilakukan secara aplikatif

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran. sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Pengembangan kerjasama lintas kabupaten / kota dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.



Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

#### B. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kejahatan

Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu. Melalui Program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan bertujuan untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum melalui pelaksanaan operasi Tim Terpadu Lintas Kabupaten / Kota. Berikut tabel pelaksanaan Operasi Tim Terpadu Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum Tahun 2019.

**Tabel 14.**  
Operasi Tim Terpadu Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Anggota Tim
1.	Operasi Tim Terpadu Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum	18 Juli 2019	Kab. Bungo	30 Org
2.	Operasi Tim Terpadu Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum	27 September 2019	Kab. Sarolangun	28 Org



# BAB 4 Penutup

Bab 4 Berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi sesuai dengan target yang ditetapkan

## A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi 2016-2021, Renjana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi 2019.
2. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan sebahagian belum memenuhi target yang direncanakan.

## B. Saran

Perlunya langkah percepatan pelaksanaan kegiatan

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber

# BAB 1 Pendahuluan

## A. Latar Belakang

**Bab 1 Berisi :**

**A. Latar Belakang**

**B. Landasan Hukum**

**C. Tujuan**

**D. Gambaran Umum**

**Satuan Polisi Pamong  
Praja dan Pemadam  
Kebakaran Provinsi  
Jambi**

**E. Peran Strategi Satuan  
Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Provinsi Jambi**

**F. Keragaman SDM Satuan  
Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Provinsi Jambi**

**G. Sistematika Laporan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara

Laporan kinerja suatu bentuk pertanggung-jawaban SKPD

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosures*) secara memadai hasil analisis



koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan fungsional serta menyusun rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalitas dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan sekretariat.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
- c. Penyusunan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset dan program;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- f. Penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan;
- g. Penyusunan pelaksanaan tugas kehumasan dan perlengkapan operasional;
- h. Penyusunan pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan dan rumah tangga kantor;
- i. Penyusunan rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme baik PNS maupun non PNS;
- j. Pelaksanaan koordinasi tugas – tugas bidang;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai, baik PNS maupun non PNS; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari tiga seksi.
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian



## BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

A. Capaian Kinerja

Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 3 dibawah ini :

Tabel 4.  
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
$\leq 49,99 \%$	Tidak Baik

Pengukuran Capaian  
Kinerja

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

## Capaian Kinerja

### Organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis

Pada Tahun Anggaran 2019, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 4 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 4 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 2 indikator telah dicapai dengan hasil yang **"baik"** sedangkan 2 indikator dicapai dengan hasil yang **"kurang baik"**.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **baik** ini terlihat dari angka realisasi 96,47 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

### Sasaran Strategis 1." Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat"

Tabel 6.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Nilai
Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	96,47 %	96,47 %	Baik

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target penanganan demo tanpa anarkhis yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019 realisasi persentase penanganan demo tanpa anarkhis pada tahun 2019 sebanyak 96,47 persen mengalami penurunan sebanyak 3,53 persen atau 5 kejadian demo berakhir anarkhis bila dibandingkan dengan target di Tahun 2019 sebanyak 100 persen.

Perkembangan jumlah kejadian demo berakhir anarkhis dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 untuk semua

**Tabel 16**  
**Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme**  
**selama tahun 2019**

<b>N o</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Lokasi Pelaksanaan</b>	<b>Peserta yang difasilitasi</b>
1	Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	23 April 2019	Kota Sei. Pe nuh	50 Org
2	Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	25 April 2019	Kab. Tanjab Barat	50 Org
3	Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	25 Juli 2019	Kab. Sarola ngun	50 Org
4	Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	29 Agustus 2019	Kab. Meran gin	50 Org
5	Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	07 November 2019	Kab. Batang hari	50 Org

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

**3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, membantu penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada di daerah.



**Tabel 15.**  
**Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas**  
**selama tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Lokasi Pelaksanaan</b>	<b>Peserta yang difasilitasi</b>
1	Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas	9 April 2019	Kab. Merangin	50 Org
2	Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas	10 April 2019	Kab. Sarolangun	50 Org
3	Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas	6 Agustus 2019	Kab. Bungo	50 Org
4	Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas	27 Agustus 2019	Kab. Tebo	50 Org
5	Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas	14 November 2019	Kab. Tanjab Barat	50 Org

**Rapat Koordinasi  
Pembentukan Satlinmas**



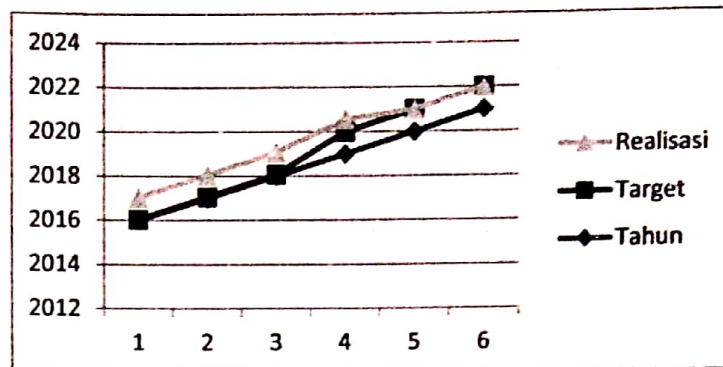
Kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme

2. Kegiatan Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme

Kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah terkait deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme. Capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 6

Realisasi Pelanggaran Perda & Perkada yg diselesaikan



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019 baru mencapai sekitar 55,50 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi setiap tahunnya dari tahun 2016-2021 sebanyak 100 persen.

Tabel 9.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Penegakan Perda dan Perkada di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021

No.	Tahun	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	5 %	100 %	100 %
2.	2017	6 %	100 %	100 %
3.	2018	7 %	100 %	100 %
4.	2019	100 %	55,50 %	55,50
5.	2020	100 %	-	-
6.	2021	100 %	-	-

Analisis penyebab turunnya realisasi penegakan perda dan perkada

Faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi penegakan perda dan perkada yaitu :

1. Target

Perubahan target mempengaruhi realisasi penegakan perda dan perkada. Target yang semula 5 sampai dengan 7 persen, sejak tahun 2019 naik menjadi 100 persen, sehingga dengan sendirinya realisasi capaian

- daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- Perlunya optimalisasi mekanisme manajemen internal
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi akan ditingkatkan secara pro aktif, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- Koordinasi akan dilakukan lebih intensif
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota.
- Perlunya sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- Perlunya fungsi *reward* and *punishment*
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment* yang tegas dan ketat.



c. Seksi PPNS

Tugas Bidang Perundang – Undangan Daerah yaitu membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk hukum daerah, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- b. Penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan PPNS bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat

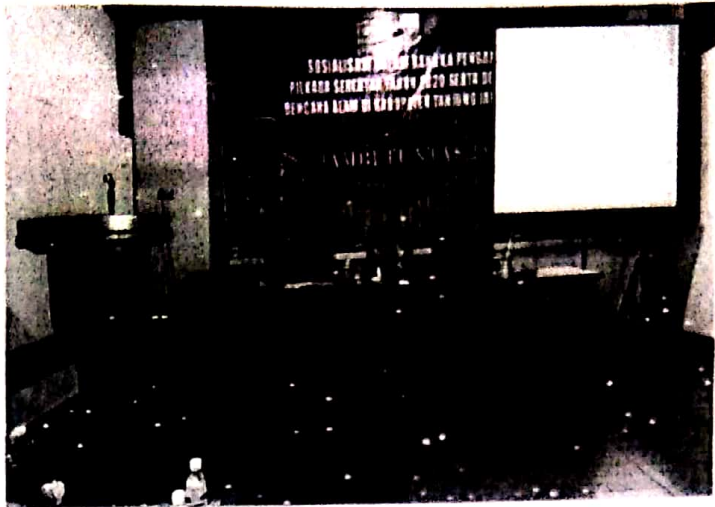
5. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari tiga seksi.

- a. Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
- c. Seksi Kewaspadaan Dini.

Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yaitu membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada serta penyeberluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM. sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada serta

## Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat



Kegiatan pengawasan  
pelaksanaan kebijakan  
pencegahan kebakaran

### D. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran dimaksudkan dalam rangka untuk mendorong Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten / Kota dalam pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran. Melalui program ini pada tahun 2019 dilaksanakan tiga kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran bertujuan untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik terhadap aparaturnya, masyarakat, badan hukum, korporasi. Pengawasan dilakukan melalui :

- Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran pada perusahaan perkebunan.
- Pemeriksaan sarana prasarana proteksi kebakaran pada gedung perkantoran OPD

# Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program Pilihan.....	24
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi .....	25
Tabel 3 Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019 .....	27
Tabel 4 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	29
Tabel 5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	30
Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	31
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkhis dengan Target Renstra 2016-2021.....	32
Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	34
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Penegakan Perda dan Perkada dengan Renstra 2016-2021 .....	35
Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	36
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemenuhan cakupan petugas Linmas dengan Target Renstra 2016-2021 .....	38
Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 .....	38
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK dengan Renstra 2016-2021 .....	40
Tabel 14 Operasi Tim Terpadu Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019 .....	42
Tabel 15 Rapat Koordinasi Pembentukan Satlinmas Tahun 2019 .....	47
Tabel 16 Sosialisasi Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme Tahun 2019 .....	48
Tabel 17 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Tahun 2019.....	50
Tabel 18 Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran .....	51
Tabel 19 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019 .....	60
Tabel 20 Realisasi Anggaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2019 menurut Bidang dan Sekretariat .....	53



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### C. Tujuan

Penyusunan laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Dasar pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Provinsi Jambi

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan perangkat daerah sebagai salah satu pelaksana urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Tugas sebagaimana PERGUB Jambi Nomor 8

Sesuai PERGUB Jambi Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 3 disebutkan bahwa " **Satuan Polisi Pamong Praja dan**

terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dan merupakan alat kendali, pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi serta juga sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum  
penyusunan Laporan  
Kinerja

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



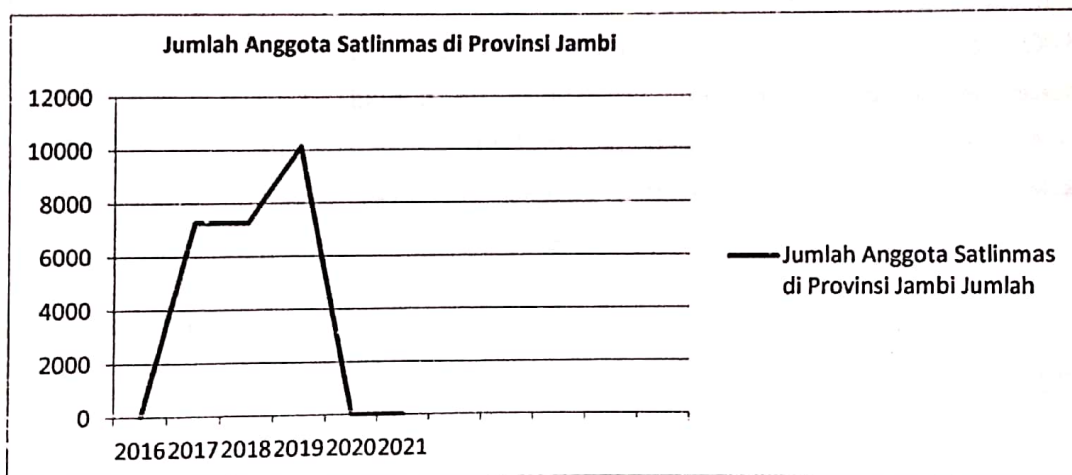
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2019, realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2019 sebesar 64,80 % (10.128 orang) atau mencapai 91,43 % bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 10.934 orang.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2016-2021

Perkembangan pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 untuk semua kabupaten / kota dalam Provinsi Jambi juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 7  
Jumlah Anggota Satlinmas di Provinsi Jambi



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Jumlah cakupan petugas perlindungan masyarakat sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai sekitar sebesar 64,80 % (10.128 orang) dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 sebanyak 15.620 orang.



#### e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menerapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2**

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	$\frac{\text{Jumlah demo anarkhis}}{\text{Jumlah demo keseluruhan}} \times 100\%$	Satpol PP Provinsi Jambi	Laporan hasil pendataan pengamanan aksi demo  Laporan Dinas Instansi terkait Kab/Kota
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$	Satpol PP Provinsi Jambi	Laporan hasil penegakan perda

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Implementasi penetapan/ perjanjian kinerja dalam program/kegiatan

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan strategis, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2019. Sepanjang tahun tersebut Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2019 dan Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2014.

Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

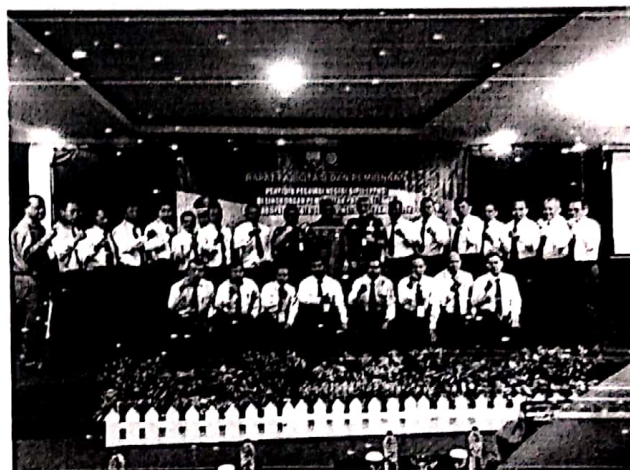
Tabel 3  
Penetapan/Perjanjian Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.253.784.200
			1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.119.668.400
			2. Kesamaptaaan	134.115.800

Kegiatan Pengembangan kemampuan aparat polisi pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

2. Kegiatan Pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan pengetahuan serta fasilitasi pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi PPNS se- Provinsi Jambi tanggal 17 s/d 19 Juni 2019 bertempat di Hotel 02 Weston Jambi dengan peserta sebanyak 30 orang dan dihadiri oleh Direktur Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri. Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi saat ini adalah 10 orang, sedangkan PPNS keseluruhan Satpol PP kabupaten / kota berjumlah 45 orang.

Rapat Koordinasi PPNS se- Provinsi Jambi





Sasaran Strategis	Indiator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum	- Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	- Cakupan petugas perlindungan masyarakat	70 % (10.128) org
Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap ( Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran .	100 %

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamang Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019

### c. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten / kota;
2. Antisipasi dini penyampaian aspirasi masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP;
4. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur baik secara non yustisia maupun pro yustisia;
5. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pemetaan daerah rawan kebakaran;
7. Pemenuhan Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

### d. Program Prioritas

Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Pada tahun 2019 program Prioritas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari 4 ( Empat ) program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.  
Program ini bertujuan untuk menyiapkan antisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik dalam penyiapan personil, sarana dan prasarana operasional maupun koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan lintas kabupaten / kota.



### Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah

#### 3. Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah.

Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah dimaksudkan dalam rangka pengamanan dan pengawasan aset pemerintah Provinsi Jambi. Pengamanan dilakukan terhadap aset, serta pengamanan lokasi kegiatan termasuk pengamanan orang (Pimpinan Daerah) dalam aktivitas pemerintahan, sedangkan pengawasan dilakukan melalui patroli wilayah sebagai antisipasi dan cegah dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

### Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa

#### 4. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa.

Pengamanan unjuk rasa dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyampaian aspirasi masyarakat yang berujung tindakan anarkhis, karena nantinya akan berpengaruh kepada Indeks Demokrasi. Hal ini adalah salah satu Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Prinsipnya adalah penyampaian aspirasi terlaksana dengan baik tetapi tidak menimbulkan tindakan anarkhis. Capaian kegiatan selama tahun 2019 di Pemerintah Provinsi Jambi terjadi 108 kali kejadian unjuk rasa, namun ada 5 kali berakhir dengan anarkhis.



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatnya Stabilitas tibatranmas dan hukum	2 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 - Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	4 %	5 100 %	6 100 %	7 100 %	8 100 %	9 100 %	10 100 %
	Meningkatnya stabilitas tibatranmas dan hukum	- Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan	%	5 %	6 %	7 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	- Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	-	30 % (4.686) org	50 % (7.810) org	70 % (10.128) org	90 % (14.058) org	100 % (15.620) org
	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap ( Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran .	%	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019*

**Sistematika Penulisan  
Laporan**

Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Sistematika penulisan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif)

**Bab I   Pendahuluan,**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II   Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III   Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

**Analisis penyebab demo anarkhis**

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa persentase penanganan demo tanpa anarkhis selalu bervariasi mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019, hal ini disebabkan karena ditunjang oleh kondisi sosial masyarakat.

Penyebab terjadinya aksi demonstrasi dapat dibagi kedalam berbagai faktor 1). Faktor ideologi 2). Faktor politik , 3). Faktor ekonomi, 4) Faktor sosial budaya.

**Faktor internal yang mempengaruhi demo anarkhis**

Adapun faktor yang mempengaruhi demo anarkhis yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan manajerial
2. Pengalaman aparaturnya dalam mengelola aksi.
3. Kemampuan deteksi dini.
4. Lengkap tidaknya sarana yang dimiliki

**Faktor eksternal yang mempengaruhi demo anarkhis**

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi demo anarkhis yaitu :

1. Ada tidaknya dukungan dari instansi terkait seperti POLRI dan TNI.
2. Kondisi psikis para pendemo termasuk banyaknya jumlah serta lamanya aksi dilakukan.
3. Cepat atau lambatnya penerimaan aspirasi oleh pejabat yang berwenang.

**Langkah upaya menurunkan angka demo anarkhis**

Langkah yang perlu diperhatikan dalam menurunkan angka demo anarkhis yaitu :

1. Peningkatan profesionalitas aparaturnya dalam menangani aksi demonstrasi.
2. Pengembangan sistem antisipasi dini.
3. Menerapkan manajemen konflik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada kalangan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti POLRI dan TNI.



Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 1,92 %. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.

2. Realisasi penyerapan anggaran per Eselon III menunjukkan bahwa penyerapan serapan anggaran tertinggi oleh bidang pengendalian kebakaran sebesar 98,92 % sedangkan yang terendah adalah sekretariat sebesar 96,77 %.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No.	Tahun	Pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	-	-	-
2.	2017	30 % (4.686 org)	46,66 % (7.270 org)	155,33 %
3.	2018	50 % (7.810 org)	46,66 % (7.270 org)	93,08 %
4.	2019	70 % (10.934 org)	64,80 % (10.128 org)	91,43 %
5.	2020	-	-	-
6.	2021	-	-	-

Analisis penyebab naiknya tingkat pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat

Faktor yang menentukan tingkat pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota.
2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jambi.
3. Pendataan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota.

Upaya peningkatan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota.

Sosialisasi yang dilakukan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pembentukan petugas perlindungan masyarakat oleh kabupaten / kota. Oleh karena itu pembinaan, pengawasan serta pendataan petugas perlindungan masyarakat perlu terus dilakukan agar data cakupan petugas perlindungan masyarakat Provinsi Jambi selalu update.

**Sasaran Strategis 4." Meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran".**

**Tabel 12.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK	100 %	66,35 %	66,35 %

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran merupakan waktu maksimal yang harus dipenuhi untuk mengurangi resiko

## Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran



Kegiatan pelayanan  
penanggulangan bahaya  
kebakaran

### 3. Kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kabupaten / kota. Capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 18**  
**Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya**  
**kebakaran**  
**selama tahun 2019**

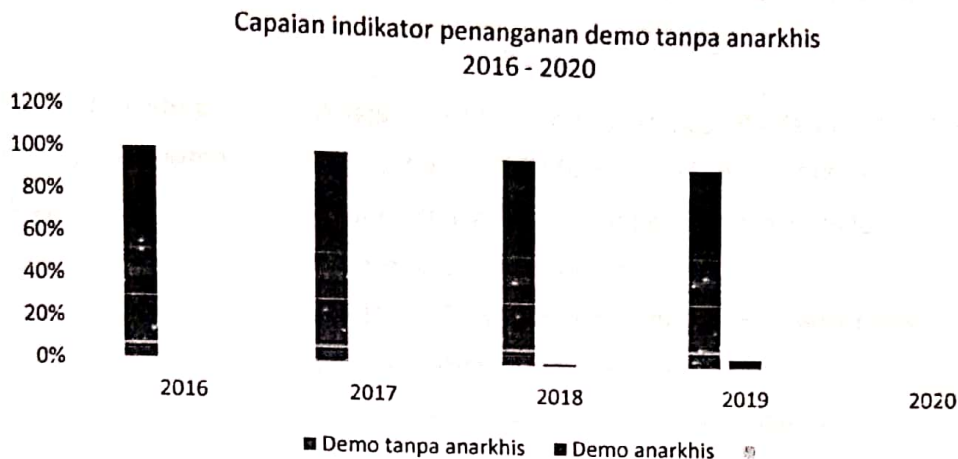
No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Peserta yang difasilitasi
1.	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan an bahaya kebakaran	02 Juli 2019	Aula Kesbangpol Kabupaten Merangin	50 Org
2.	Sosialisasi pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran	14 November 2019	Aula Kantor Camat Rimbo Tengah Kabupaten Bungo	50 Org



Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2016-2021

kejadian demo yang berakhir anarkhis menunjukkan perkembangan yang sangat variatif. Adapun capaian persentase penanganan demo tanpa anarkhis tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik 5**  
**Capaian Indikator Penanganan Demo Tanpa Anarkhis**



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Sampai dengan tahun 2019, persentase penanganan demo tanpa anarkhis selalu bervariasi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 setiap tahunnya 100 persen. Diperkirakan persentase penanganan demo tanpa anarkhis akan selalu bervariasi sampai dengan tahun 2021, tergantung situasi sosial masyarakat.

**Tabel 7.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja persentase penanganan demo tanpa anarkhis di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No.	Tahun	persentase penanganan demo tanpa anarkhis		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	100 %	100 %	100
2.	2017	100 %	100 %	100
3.	2018	100 %	98,63 %	98,63%
4.	2019	100 %	96,47 %	96,47 %
5.	2020	100 %	-	-
6.	2021	100 %	-	-

turun.

2. Produktivitas

Produktivitas aparaturnya penegak perda dan perkada masih rendah sementara jumlah perda yang memuat sanksi cenderung bertambah.

3. Saprasi dan anggaran

Rendahnya produktivitas penegakan perda dan perkada tidak terlepas dari relatif terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya anggaran.

Upaya peningkatan produktivitas penegakan perda

Peranan aparaturnya, sapras dan anggaran serta pengelolaan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas penegakan perda dan perkada antara lain :

1. Menyiapkan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas.
2. Menyiapkan sarana kerja melalui pembentukan sekretariat PPNS daerah.
3. Mengadakan rapat fasilitasi bagi tenaga PPNS agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
4. Mengalokasikan anggaran yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

**Sasaran Strategis 3.** " Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan "

**Tabel 10.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Cakupan petugas perlindungan masyarakat.	70 % (10.934) org	64,80 % (10.128) org	91,43 %

Pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada di daerah.

5 Program Prioritas  
Pembangunan Provinsi  
Jambi

beragama dan kesadaran hukum masyarakat;

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Program Pembangunan Desa**, dengan fokus :
  - a. Terentasnya kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja;
  - b. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa;
  - c. Meningkatnya tata kelola perdesaan yang optimal.
2. **Program Bantuan Beasiswa kepada 15.000 orang**, dengan fokus :
  - a. Jumlah bantuan akan diatur;
  - b. Bantuan setiap tahun 3.000 orang
  - c. Sasaran KK miskin dengan kriteria jurusan yang dibutuhkan daerah, tenaga medis dan guru.
3. **Program penanganan kebakaran lahan dan hutan**, dengan fokus :
  - a. Penanganan Desa Gambut (237 Desa Gambut).
  - b. Kesiapsiagaan dalam penanganan Bencana.
4. **Program Pengembangan Wilayah**, dengan fokus :
  - a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Muara Sabak;
  - b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuala Tungkal.



Provinsi Jambi.

- Rapat koordinasi dengan dinas kebakaran kabupaten / kota.
- Monitoring, evaluasi dan pendataan kebakaran di kabupaten / kota.

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

2. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dilaksanakan dalam rangka mengedukasi masyarakat terhadap bahaya kebakaran serta upaya untuk mengurangi dampak dan resiko dari bahaya kebakaran, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang cukup untuk mengantisipasi segala kemungkinan terhadap potensi kebakaran. Capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran selama tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Peserta yang difasilitasi
1	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	11 Juli 2019	Aula Kantor Bupati Bungo	50 Org
2	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	15 oktober 2019	Kantor Dinas kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjab barat	50 Org

Tujuan yang ingin diwujudkan	<p><b>a. Tujuan</b></p> <p>Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempersiapkan diri untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.</p>
Pembangunan ketentraman dan ketertiban umum memberikan sumbangan bagi terwujudnya situasi daerah yang kondusif	<p>Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan untuk tahun 2016-2021 perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi periode 2016-2021. Dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum guna mendukung pencapaian misi ke - 3 " JAMBI TUNTAS 2021 " yaitu ; Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.</p>
Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	<p><b>b. Sasaran</b></p> <p>Kondisi ketentraman dan ketertiban umum pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan dan dinamika idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.</p> <p>Berdasarkan tujuan, maka sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan Indikator Kinerja; Persentase penanganan demo tanpa anarkhis ;</li> </ol>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya stabilitas tibatranmas dan hukum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	100 %	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 3. Pengamanan asset dan patroli wilayah 4. Pengamanan unjuk rasa 5. Pengawasan pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah lainnya 6. Peningkatan kerjasama dalam penegakan produk hukum daerah	477.790.000  85.061.250  185.910.750  344.000.000  227.987.500 99.546.000  126.987.900
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keterlibatan dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	70 %	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 2. Deteksi dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme 3. Peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat	988.413.000  315.023.000  360.396.400  312.993.600
Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bakaran di daerah rawan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 2. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 3. Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	754.371.300  89.782.400  93.672.600  78.877.500



# Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi .....	5
Gambar 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 .....	22

bencana kebakaran, sehingga tidak menimbulkan korban dan kerugian yang lebih banyak.

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019

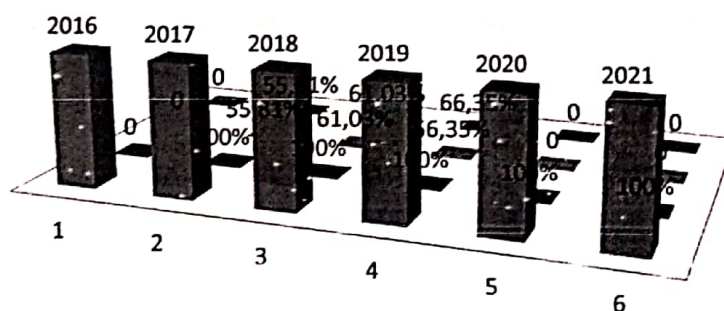
Bila dibandingkan dengan target Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja 2019, Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK belum mencapai target bila dibanding dengan target 2019 sebesar 100 %.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2016-2019

Perkembangan pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Adapun Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik 8**  
**Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK**

- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK Tahun
- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK Target
- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK Realisasi
- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK capaian



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK sampai dengan tahun 2019 baru mencapai sekitar 66,35 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 sebesar 100 %.

Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan terutama dalam membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan dalam suasana aman, tertib dan teratur. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : Tersedianya 129 orang tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk membantu menjaga, mengawal dan mengamankan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Peningkatan kesiapsiagaan SDM melalui kegiatan kesamaptaan

2. Kegiatan kesamaptaan bertujuan untuk memberikan latihan ketrampilan dan ketangkasan dalam rangka kesiapsiagaan personil menghadapi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Capaian kegiatan yaitu telah dilaksanakannya antara lain : Pembinaan dan pelatihan kepada 129 orang anggota Satpol PP

Latihan kesamaptaan Satpol PP





2. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum, dengan Indikator Kinerja ; Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan ;
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan Indikator Kinerja ; Cakupan petugas perlindungan masyarakat ;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran, dengan Indikator Kinerja ; Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

**Gambar 2.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

<b>T U J U A N</b>	Meningkatnya Stabilitas tibumtranmas dan hukum			
<b>S A S A R A N</b>	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum	3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	4. Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bakaran di daerah rawan kebakaran
<b>S T R A T E G I</b>	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten / kota; 2. Antisipasi dini penyampaian aspirasi masyarakat; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP	1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur baik secara non yustisia maupun pro yustisia	1. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Pemetaan daerah rawan kebakaran 2. Pemenuhan Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Program ini dimaksudkan dalam rangka memelihara ketentraman dan menciptakan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah serta pengawalan dan pengamanan aset.

3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program ini bertujuan untuk mendorong kabupaten / kota dalam pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada daerah.

4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran

Pelaksanaan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota melalui pemetaan daerah rawan kebakaran, sosialisasi dan penyuluhan.

Tabel 1

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program (Pilihan)

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatnya Stabilitas tibumtranmas dan hukum	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas dan hukum	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bakaran di daerah rawan kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran



- penyeberluasan informasi perlindungan hak azazi manusia.
- b. Penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada.
- c. Penyusunan program dan koordinasi mobillisasi dalam menghadapi bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada.
- d. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada.
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang Pengendalian Kebakaran 6. Bidang Pengendalian Kebakaran terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pemetaan
- b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
- c. Seksi Bina Potensi.

Tugas Bidang Pengendalian kebakaran yaitu membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan.
- b. Penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran kawasan hutan



dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah bagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

<b>Sasaran Strategis 1</b>				
<i>Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	96,47 %	96,47 %	Baik
<b>Sasaran Strategis 2</b>				
<i>Meningkatnya stabilitas tibuntranmas dan hukum</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan	100 %	55,50 %	55,50 %	Kurang Baik
<b>Sasaran Strategis 3</b>				
<i>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Cakupan petugas perlindungan masyarakat.	70 % (10.934) org	64,80 % (10.128) org	91,43 %	Baik
<b>Sasaran Strategis 4</b>				
<i>Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK	100 %	66,35 %	66,35 %	Kurang Baik

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

### Sasaran Strategis 1

#### *Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase penanganan demo tanpa anarkhis	100 %	96,47 %	96,47 %	Baik

### Sasaran Strategis 2

#### *Meningkatnya stabilitas tbumtranmas dan hukum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan	100 %	55,50 %	55,50 %	Kurang Baik

### Sasaran Strategis 3

#### *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Cakupan petugas perlindungan masyarakat.	70 % (10.934) org	64,80 % (10.128) org	91,43 %	Baik

### Sasaran Strategis 4

#### *Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK	100 %	66,35 %	66,35 %	Kurang Baik



**5. Program Pengembangan Inovasi Daerah, dengan fokus pembangunan Science And Techno Park menuju bangsa berdaya saing.**

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkalan program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pembangunan Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum terutama untuk mendukung Misi 3 (tiga) yaitu **"Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat"**. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program prioritas pembangunan khusus urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran.

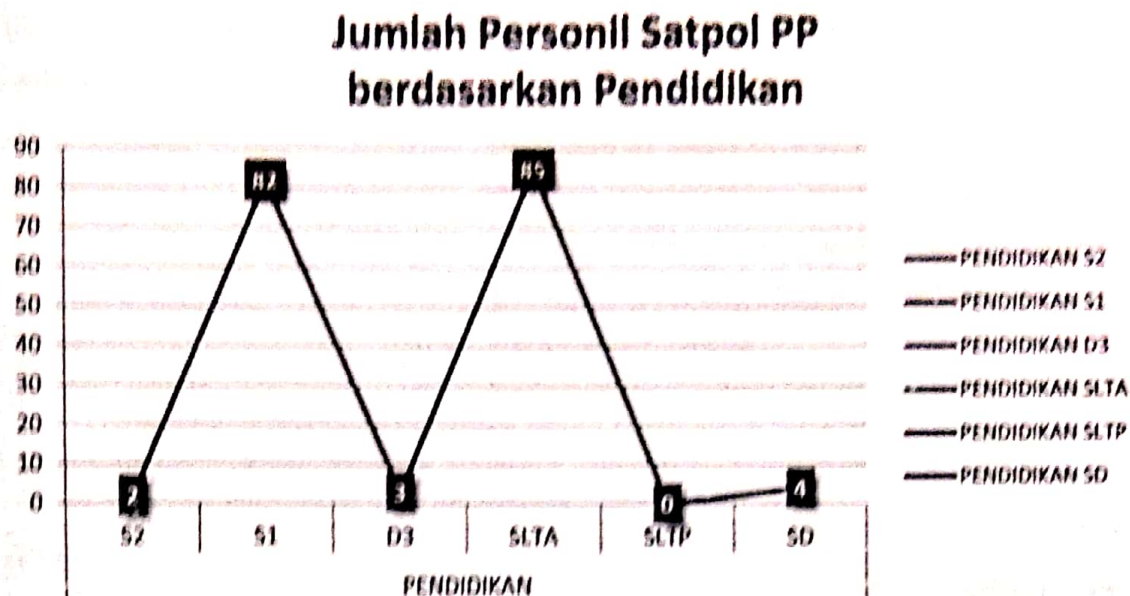
**B. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016-2021**

Perencanaan Jangka Menengah memberikan gambaran kondisi hasil yang akan dicapai

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Grafik 3

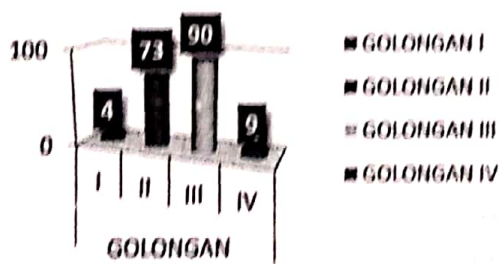
Jumlah Personil Satpol PP berdasarkan Pendidikan



Grafik 4

Jumlah Personil Satpol PP berdasarkan Pangkat/Golongan

**Jumlah Personil Satpol PP  
berdasarkan  
Pangkat/Golongan**



Sebagian besar SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan golongan adalah golongan III (90 orang). Untuk pegawai yang bergolongan IV hanya 9 orang. Sedangkan pegawai dengan golongan II sebanyak 73 orang dan sisanya masih golongan I sebanyak 4 orang.

### G. Sistematika Laporan

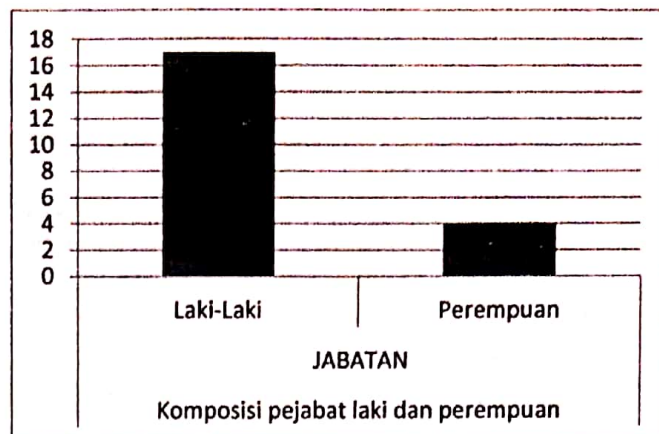
Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang terdapat dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja ini, menyajikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selama Tahun 2019. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen



Grafik 2

Komposisi Pejabat Laki-laki dan Perempuan



Bila dipilah menurut eselon, laki-laki lebih mendominasi jabatan eselon. Untuk itu perlu mendorong supaya pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau melihat data dibawah ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan kesenjangan gender justru semakin kecil

Komposisi SDM

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka jenjang pendidikan SD sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 85 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 82 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi memiliki keragaan sumber daya manusia yang masih bervariasi.



# Kata Pengantar

14/08/2020 10:00:00



Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi bertekad mengerahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Amanat tersebut termuat dalam Renstra 2016-2021 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mendukung mewujudkan visi Provinsi Jambi "Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021).

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang dari tahun ke tahun.


Sasaran pembangunan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Renstra menunjukkan peningkatan kinerja meskipun belum optimal. Berbagai pencapaian pembangunan ketentraman dan ketertiban umum pada Tahun 2019 perlu dipertahankan dan beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target optimal akan diperbaiki di tahun berikutnya

Akhir kata, diharapkan laporan akuntabilitas kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan ketentraman dan ketertiban umum di daerah yang tepat dan berkelanjutan, memantapkan ketentraman dan ketertiban umum sebagai penggerak utama demi menjaga situasi daerah yang kondusif.

Jambi,

2020

KEPALA SATUAN,

  
**Drs. H. APAN SAHARUDIN**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19680603 198810 1 001

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan  
bahaya kebakaran



**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi serapan anggaran  
belanja langsung  
sebesar 98,08 %

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pagu anggaran belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 8.783.693.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 8.416.893.682,- atau 98,08 %. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 7.500.000.000,-, maka pada Tahun 2019 terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.283.693.000,- atau sekitar 14,61 %.

Tabel 19 .  
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I	Belanja Langsung	8.783.693.000,00	8.614.893.682,00	98,08
	- Belanja Pegawai	2.439.738.000,00	2.424.282.000,00	99,37
	- Belanja Barang dan Jasa	5.060.972.000,00	4.931.718.682,00	97,45
	- Belanja Modal	1.282.983.000,00	1.258.893.000,00	98,12

*Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2019*

b. Seksi Ketertiban Umum

c. Seksi Pembinaan dan penyuluhan

Tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu membantu dinas dalam rangka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan masa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- d. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- e. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- f. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- g. Penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan bidang tugasnya

Tugas Bidang Perundang –  
Undangan Daerah

4. Bidang Perundang – Undangan Daerah terdiri dari tiga seksi.

- a. Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga